

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan lingkungan hidup dari kerusakan akibat penambang ilegal di kawasan PT. Freeport Indonesia belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Berbagai upaya yang dilakukan oleh perusahaan seperti sosialisasi dan teguran secara langsung belum berhasil menurunkan jumlah penambang ilegal secara signifikan sehingga sampai saat ini aktivitas tersebut masih terus berlangsung dan terus menyebabkan kerusakan lingkungan yang beragam.
2. Kurang maksimalnya perlindungan lingkungan dari kerusakan akibat penambang ilegal ini disebabkan karena beberapa kendala yang diantaranya yaitu belum adanya regulasi yang jelas dan tegas mengenai penambangan ilegal, kurangnya koordinasi antara PT. Freeport Indonesia dengan pemerintah daerah setempat dan pihak terkait lainnya serta rendahnya kesadaran hukum para penambang ilegal terhadap aktivitas penambangan mereka.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah pusat bersama dengan Pemerintah daerah setempat perlu segera menetapkan peraturan khusus yang mengatur tentang penambangan ilegal agar penegakan hukum dapat berjalan efektif.
2. Pemerintah daerah, PT. Freeport Indonesia, aparat keamanan, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat koordinasi serta terus bersinergi satu sama lain.
3. Pemerintah daerah bersama PT. Freeport Indonesia hendaknya terus melakukan edukasi lingkungan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan para penambang ilegal agar mereka memahami dampak negatif aktivitas tersebut dan berperan aktif dalam pelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fence M. Wantu. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Reviva Cendekia, 2022.
- H. Salim HS. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- H. Salim HS. *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Indra Surya dan Ivan Yustiavandana. *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Makaraao, Mohammad Taufik. *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan* (Cetakan kedua). Jakarta: PT Indeks, 2011.
- Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Edisi Kedua. Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
- Siombo, Dr. Marhaeni Ria. *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Supriadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sutedi, Adrian. *Hukum pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Edisi 1. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Jurnal

- Hairi, Prianter Jaya. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Mining." *Info Singkat*, Volume XIII, No. 15, Agustus 2021, hlm. 2. Diakses 5 April

2025. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-15-I-P3DI-Agustus-2021-240.pdf.

Skripsi

Candra, Yopi. 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Pratama, Yogie Janu Gagah. 2023. *Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin yang Menggunakan Merkuri Sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Warlistiana, Rizki Deli. 2022. *Koordinasi Pengawasan Pengelolaan Tambang Emas Ilegal di Kabupaten Way Kanan*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Ferdi Rera dan Ibu Devota Leisubun, Petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika, 10 April 2025

Wawancara dengan Ibu K.N., Karyawan PT Freeport Indonesia, Divisi Government Relations, 23 Mei 2025.

Kuisisioner

Agung. (2025). *Jawaban kuisisioner: Aspek Hukum Perlindungan Lingkungan Dari Kerusakan Akibat Kegiatan Penambangan Ilegal Di Kawasan PT. Freeport Indonesia* [Data primer]. Timika, 21 Mei 2025.

Gumanus.(2025). *Jawaban kuisisioner: Aspek Hukum Perlindungan Lingkungan Dari Kerusakan Akibat Kegiatan Penambangan Ilegal Di Kawasan PT. Freeport Indonesia* [Data primer]. Timika, 21 Mei 2025.

Lain-lain

Agincourt Resources. "Bahaya Pertambangan Ilegal Terhadap Lingkungan." Diakses 14 Oktober 2024. <https://agincourtresources.com/id/2020/02/07/bahaya-pertambangan-ilegal-lingkungan/>.

Geograf.id. "Pengertian Aspek Hukum." Diakses 1 Desember 2024. <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-aspek-hukum/>.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. "Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama." Siaran Pers Nomor: 259.Pers/04/SJI/2022. Diakses 14 Oktober 2024. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama>.

Pahilda, Rahmawati Widia. "Pemantauan Kualitas Air Sungai." Diakses 14 Oktober 2024. <https://gesi.co.id/pemantauan-kualitas-air-sungai/>.

Riadi, Muchlisin. "Pengertian, Jenis, Asas dan Tahapan Pertambangan." Diakses 14 Oktober 2024. <https://www.kajianpustaka.com/2018/12/pengertian-jenis-asas-dan-tahapan-pertambangan.html>.

Saputro, Wendiyanto. "Dampak Pertambangan Ilegal: Kerusakan Lingkungan dan Kerugian Negara." Diakses 14 Oktober

2024. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/dampak-pertambangan-ilegal-kerusakan-lingkungan-dan-kerugian-negara-1yRpZDa7wZ3/full>.

Hukumku. "Jenis-Jenis Usaha Pertambangan dan Fungsinya." *Hukumku.id*. Diakses 28 Maret 2025. <https://www.hukumku.id/post/jenis-izin-usaha-pertambangan/>.

Astuti. "Jenis-Jenis Izin Usaha Pertambangan." *Lex Mundus*. Diakses 28 Maret 2025. <https://lexmundus.com/articles/jenis-jenis-izin-usaha-pertambangan/>.

Setiawan, Indra. "Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin." *IndraSatrianis.com*. Diakses 5 April 2025. <https://www.indrasatrianis.com/tindak-pidana-penambangan-tanpa-izin/>.

Mekari Klikpajak Editorial. "Mengenal Izin Usaha Pertambangan." *Klikpajak.id*. Diakses 28 Maret 2025. <https://klikpajak.id/blog/iup-izin-usaha-pertambangan/>.

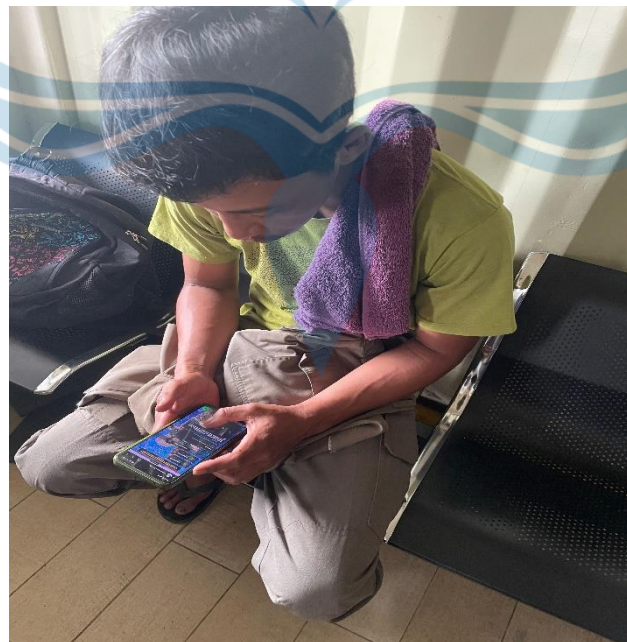
Ilmutambang.com. "Apa Itu Good Mining Practice? Dan Mengapa Penting Diterapkan?" 13 Juli 2022. Diakses pada 14 Oktober 2024. <https://ilmutambang.com/apa-itu-good-mining-practice-dan-mengapa-penting-diterapkan/>.



LAMPIRAN



Pengisian kuisisioner oleh bapak Gumanus, Penambang emas di kawasan PT. Freeport
Indonesia.



Pengisian kuisisioner oleh bapak Agung, Penambang emas di kawasan PT. Freeport Indonesia.